

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Perkembangan ini mempengaruhi oleh meningkatnya perhatian dan tuntutan masyarakat akan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Menurut Nordiawan et all (2008 : 3) “ Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah”. Menurut Ismaya (2006 : 307) “ Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah”. Menurut Arifin dan Ghozali (2001 : 5) “ Akuntansi Pemerintahan merupakan data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*nonprofit organization*)”.

Jadi berdasarkan dari beberapa definisi diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (*Nonprofit organization*) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba.

2.2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Adapun karakteristik akuntansi pemerintah terdiri dari beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut, Baswir (2000 : 11):

- a) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan;
- b) Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya

perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan kepemilikan pribadi

- c) Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya.
- d) Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

2.3. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut Arifin dan Ghozali (2001 : 111) “ Pelaporan Keuangan Pemerintah merupakan laporan keuangan yang menunjukkan keadaan rekening budgetair dan rekening proprietary harus disusun secara periodik (bulanan, kuartalan, tahunan) untuk pengendalian kegiatan keuangan”.

2.3.1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi. Untuk pemerintah pusat, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan dua subsistemnya, yaitu : Laporan keuangan yang dihasilkan SiAP dan SAI. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara dengan kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.3.2. Entitas Pelaporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Menurut **PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah** paragraf 19 dinyatakan bahwa entitas Pelaporan keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan

Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan begitu juga dengan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan dilihat dari beberapa pendapat. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah No.01 tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Stándar Akuntansi Keuangan (2007: 3) “Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan“.

2.4. Sistem Pencatatan

Menurut Halim (2002:36) menyatakan ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry* berikut dijelaskan masing-masing sistem pencatatan tersebut :

a. *Single Entry*

Single Entry disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran“. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain

yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan dalam penyusunan pelaporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan diatas. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan *double entry*.

b. Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (*double* = berpasangan/ganda, *entry* = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini sering disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan disisi kredit ada disebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami pencatatan sistem ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Pemilik} + \text{Pendapatan}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang dilakukan sama dengan untuk belanja. Hal yang sebaliknya yang dilakukan untuk hutang, ekuitas dana dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya hutang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya hutang, maka pencatatan akan dilakukan disisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Cara melakukan pencatatan sistem *double entry* atau menjurnal ini adalah dengan mencatat sisi debit tepat disisi kiri dan mencatat disisi kredit agak menjorok ke kanan 1-2 cm.

c. Triple Entry

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja (satker) maupun pada bagian keuangan badan/biro

pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Pada kantor PPPPTK IPA sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) karena dengan menggunakan sistem ini khususnya pada bagian pembukuan dapat dengan mudah mengakui atau mencatat suatu transaksi atau peristiwa lain pada sisi debet dan kredit dengan nilai yang sama. Pencatatan tersebut akan menghasilkan keseimbangan persamaan akuntansi pada posisi keuangan, sehingga aset sama dengan kewajiban dan ekuitas dana.

2.5. Dasar Akuntansi

Menurut Bastian (2007 :66) menyatakan “Dasar akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Dasar akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Terdapat empat macam dasar akuntansi yaitu, sebagai berikut :

a. Akuntansi berbasis kas

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana, dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk laporan Penerimaan dan Pengeluaran atau arus kas. Selain itu, perlu dibuat suatu catatan atas laporan keuangan atau yang menyajikan secara detail item-item yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti :

- Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva tetap dan utang/pinjaman.
- Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual, seperti komitmen, kontinjensi, dan jaminan.
- Item-item lain seperti informasi yang bersifat prakiraan (*forecast*)

b. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan Pengeluaran kas yang terjadi selama satu periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu. Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

c. Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual berarti basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

d. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun.

2.6. Transparansi, Akuntabilitas Sektor Publik serta Lingkungan yang mempengaruhi

2.6.1. Pengertian Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut **Mardiasmo (2002:30)** pengertian transparansi adalah " Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat". Menurut **Nordiawan (2006 : 131)** menyatakan " Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

2.6.2. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Arifin dan Ghozali (2001 : 52) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”. Menurut Mardiasmo (2002:29) mengatakan ” Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan (2006:35) mengatakan ” Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Seperti yang telah dijabarkan dari beberapa definisi tersebut menurut Mardiasmo (2002 : 21) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.

- Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilita Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,

• Akuntabilitas Kinerja

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

- Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *Financial* Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

2.7. Lingkungan yang mempengaruhi

Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan akan sangat mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan tersebut. Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian transparansi dan akuntabilitas suatu entitas adalah lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah keefektifan transparansi dan akuntabilitas entitas atas wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat antara lain, yaitu :

- a. Falsafah dan konstitusi Negara

- b. Tujuan dan konsep pembangunan regional

- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
- e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- f. Pengakuan hukum yang memadai
- g. Tingkat keterbukaan pengelolaan
- h. Sistem manajemen birokrasi
- i. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program

Kesembilan faktor tersebut tidak saling bertentangan akan tetapi saling mempengaruhi corak transparansi dan akuntabilitas secara simultan dan saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga diurai pengaruhnya tanpa mengaitkan satu faktor dengan faktor yang lain.

2.8. Kerangka Teoritis

Manajemen kinerja adalah suatu upaya untuk memperoleh dan meningkatkan hasil terbaik dari tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Manajemen kinerja bersifat menyeluruh meliputi semua elemen, input yang harus didayagunakan oleh organisasi dan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga manajemen kinerja berhubungan dengan perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada semua aspek manajerial. Dari semua aspek manajerial tersebut terkait dengan penggunaan sumber daya termasuk di dalamnya penggunaan sumber daya keuangan yang harus dikelola secara baik.

Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang diungkapkan dalam *agency theory*. Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul manakala pihak pemberi amanah (*principal*) memberikan amanah kepada pihak lain (*agent*) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan *principal*. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi

(Jensen dan Meckling, 1976). Diharapkan konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan atau *stewardship* aparat pemerintah kepada rakyat dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Berdasarkan kondisi di atas peran aturan, mekanisme, prosedur, pemahaman dan kualitas SDM mengenai tatakelola keuangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan desa dibutuhkan.

Pengelolaan atau tatakelola organisasi diistilahkan dengan kata *governance*. Kata *governance* berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah. Tatakelola yang baik atau diistilahkan *good governance* yang memiliki 8 karakteristik utama, meliputi partisipatori, orientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, keadilan dan inklusif, dan penegakan hukum (UNDP, 1997). Dalam rangka mencapai *good governance* pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan tatakelola keuangan desa yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa mendukung pengungkapan informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah desa. Pengungkapan diistilahkan dengan kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Gibbins, Richardson and Waterhouse (1990,) mendefinisikan *disclosure* keuangan sebagai pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan, kuantitatif maupun kualitatif, wajib maupun sukarela, melalui jalur formal maupun informal. Dengan demikian informasi terkait pengelolaan keuangan yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi utama pemerintahan desa yang didanai dari dana publik.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola keuangan yang mampu mendukung pengungkapan yang transparan dan akuntabel, tata kelola keuangan pemerintahan desa memerlukan dukungan sistem informasi yang difasilitasi teknologi informasi untuk tercapainya ketepatan dan kecepatan tatakelola keuangan desa. Sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya atau sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk menyediakan informasi dalam rangka mendukung operasi, manajemen dalam suatu organisasi. Menurut O'Brien (2005), sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari *people* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (piranti lunak), *computer networks and data communications* (jaringan komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan

informasi di dalam organisasi. Sistem informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas tatakelola keuangan secara efisien dan efektif.

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. (Sri Maharsi, 2000). Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Ada tiga aspek dalam tata kelola keuangan desa yaitu perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Adapun kegunaan dalam suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membedakan arah dari setiap kegiatan dengan jelas sehingga hasil yang diperoleh bisa seefektif dan seefisien mungkin.
- b. Untuk mengevaluasi setiap tujuan-tujuan yang sudah dilakukan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga bisa dihindari lebih awal.
- c. Memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul sehingga sehingga lebih waspada dan dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Menurut Gomes (1995), anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi fungsi perencanaan, anggaran merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dari fungsi pengawasan, anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Dari sisi fungsi koordinasi, anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam organisasi, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Dari sisi anggaran sebagai pedoman kerja, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Menurut Marconi dan Siegel (1989), manfaat anggaran adalah:

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.

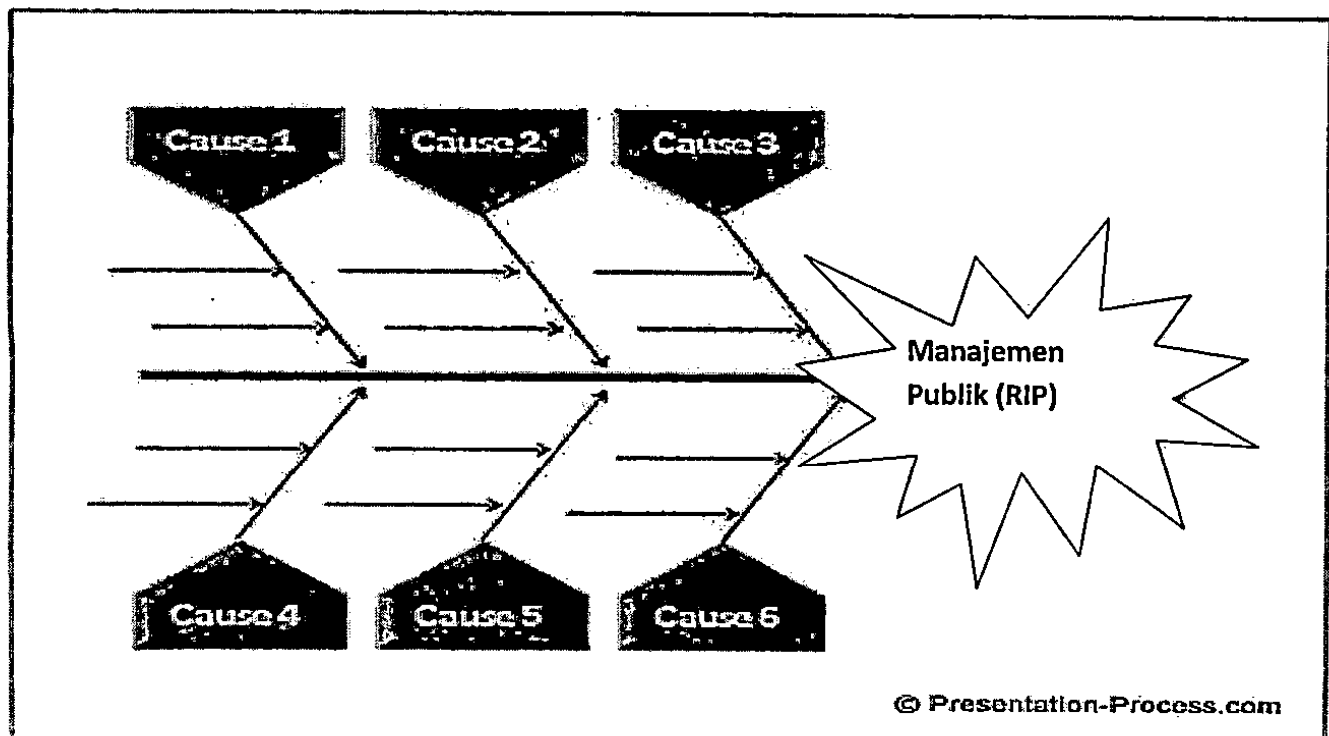
3. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
4. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

Penatausahaan keuangan daerah adalah suatu sistem akuntansi yang dilaksanakan baik secara manual maupun berbasis sistem informasi yang dilaksanakan untuk melakukan proses pencatatan, administrasi, dan pelaporan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka menyusun laporan keuangan desa, perlu disusun sistem akuntansi pemerintahan desa. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi-komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan. Artinya dalam hal ini agar kinerja yang dihasilkan dapat bermanfaat atau dapat dicapai dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat untuk itu para aparatur harus didukung dengan penerapan sistem dan teknologi informasi. Peran sistem dan teknologi informasi ini sangat penting disamping untuk mengikuti perkembangan teknologi juga untuk bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk kelancaran kerja agar nantinya pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat. Dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan keuangan desa, bentuk sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah Sistem

informasi yang digunakan untuk mendukung tatakelola keuangan desa baik dalam tahapan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan, maupun pelaporan keuangan desa. Untuk dapat mendukung optimasi implementasi tatakelola keuangan desa, selain aspek sistem dan teknologi informasi, aspek kapasitas aparatur desa dalam menguasai tatakelola keuangan desa tersebut merupakan kunci keberhasilan, sehingga pelatihan sistem informasi yang didukung teknologi informasi diduga mampu mendukung pemahaman dan penguasaan tatakelola keuangan desa yang akhirnya meningkatkan optimasi tatakelola keuangan desa itu sendiri. Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha: Terdapat perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap tatakelola keuangan desa antara sebelum dan sesudah dilakukan workshop tatakelola keuangan desa menggunakan sistem informasi keuangan desa yang didukung teknologi informasi.

2.9. Road Penelitian Berbasis RIP (Rencana Induk Penelitian)



1	Suryo pratolo, (2006)	Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengendalian Internal, Audit Manajemen terhadap Good Corporate Governance dan Kinerja Organisasi Pada BUMN di Indonesia
2	Astri Furqani, (2010)	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good governance (Studi Pada Pemerintahan Desa kalimo'ok Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep)
3	Nouruz Zaman Oktav.(2010)	Otonomi Desa dan pemerintahan Desa:Studi Kasus

		Pemerintahan desa Bobotsari
4	Aprisiami Putriyanti(2012)	Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik-Kecamatan Grabag-Kabupaten Purworejo
5	Yoyok Sudarmaji, (2009)	Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana-Kabupaten Pati.
6	Indro Budiarto, (2007)	Penilaian masyarakat desa terhadap pemerintahan desa dalam era otonomi daerah (survey:Desa Sriharja,Kecamatan Imogiri-hantul-DIV)